

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan ke-3, (Malang: Setara Press, 2015).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cetakan ke-3. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).
- \_\_\_\_\_. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan ke-4. (Bandung: Alumni, 2010).
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Hartini, Sri dkk. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Hartono, Sunaryati. *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000).
- Kurniawan, Mahendra dkk. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati Indrati. *Ilmu Perundang Undangan Proses dan Teknik Pembuatannya*. Cetakan ke-15. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

\_\_\_\_\_. *Ilmu Perundang Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Cetakan ke-18. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Supardjaja, Komariah Emong. et al. "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak Hak Perempuan". *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM*. Tahun 2006.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Edisi ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusi*. (Jakarta: Total Media, 2009).

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Cetakan ke-5. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2016).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)*.

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058).*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.*
- \_\_\_\_\_. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

PBB, Majelis Umum. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. 217 A (III) (Paris, 1948.) [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) diakses 28 Agustus, 2018.

### C. Artikel

- Anonim, “Dua PNS Jadi Istri Kedua, Dipecat”, <https://regional.kompas.com/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua.dipecat>, 10 Agustus 2018, 16.48 WIB.
- \_\_\_\_\_. “Pemerintah Harus Segera Buat PP Anak Luar Kawin” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f746240aa659/pemerintah-harus-segera-buatpp-anak-luar-kawin>, 19 Februari 2019, 10.20 WIB.

- \_\_\_\_\_. “Profil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu” <http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-kepegawaian-daerah-bkd-kota-batu/>, 06 Februari 2019, 08.27 WIB.
- \_\_\_\_\_. “Profil/Komnas Perempuan”, <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, 06 Februari 2019, 08.44 WIB.
- Hidayat, Eko. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Tahun 2016.
- Marwan Hsb, Ali. “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Edisi No.14 Tahun 2017.
- Putri, Elsafira. Bab III Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Perkawinan. [http://www.academia.edu/28915303/BAB\\_III\\_JAMINAN\\_HAK\\_ASA\\_SI\\_MANUSIA\\_DALAM\\_PERKAWINAN](http://www.academia.edu/28915303/BAB_III_JAMINAN_HAK_ASA_SI_MANUSIA_DALAM_PERKAWINAN), 01 Desember 2018.
- Rafik, Mohammad. “Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi No. 2 Tahun 2010.
- Rais Rozali, Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, <http://biro.hukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>, 30 Agustus 2018.
- Salawati, Fitri et al. “Perempuan Menjadi Istri Kedua Di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang”. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Tahun 2017.
- Yuliani, Andi. “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”. *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI*, Edisi ke-14 Tahun 2017.

#### **D. Kamus**

Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta,1986).

#### **E. Putusan Pengadilan**

Indonesia. *Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 1199/Pdt.G/2013/PA.Bta*.

\_\_\_\_\_. *Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 72 PK/TUN/2011*.